

**PENGARUH PERKARA DI PENGADILAN,
KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS, DAN
PENGUNGKAPAN SECARA PROAKTIF
TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN LISTING
BEI**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

SULAIMAN
NIM. 12030111140217

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015

PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN

Nama Penyusun : SULAIMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111140217
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH PERKARA DI PENGADILAN,
KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS, DAN
PENGUNGKAPAN SECARA PROAKTIF
TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN LISTING
BEI**

Dosen Pembimbing : Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 19 Maret 2015

Dosen Pembimbing,



Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt.

NIP. 19810813 200801

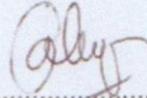
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Sulaiman
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111140217
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH PERKARA DI PENGADILAN,
KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS, DAN
PENGUNGKAPAN SECARA PROAKTIF
TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN LISTING
BEI**

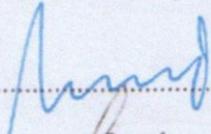
Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 2 April 2015

Tim Penguji:

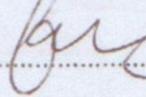
1. Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt.

()

2. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt.

()

3. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt.

()

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Sulaiman, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH PERKARA DI PENGADILAN, KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS, DAN PENGUNGKAPAN SECARA PROAKTIF TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN LISTING BEI** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima

Semarang, 19 Maret 2015
Yang membuat pernyataan,

Sulaiman
NIM. 12030111140217

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of case on court , board size, number of independent commissioners, number of board meetings, number of other companies' boards in which the commissioners are members , frequency of board meetings, disclosure of earnings forecasts, and disclosure of CSR on the performance of companies with size as variable control

The population in this research are all companies in all areas of business listed on the Stock Exchange in 2013. The sampling method used in this research is cross-sectional sampling. The number of samples in this research are 307 companies. The results show that the disclosure of CSR has a significant effect on the performance of the company, while the other independent variables have no significant effect on the performance of the company.

Keywords: characteristics of the board of directors, the company's performance, Case in court, proactive disclosure, GCG

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perkara di pengadilan, , ukuran dewan komisaris, jumlah komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, rangkap jabatan dewan komisaris, frekuensi kehadiran rapat dewan komisaris, pengungkapan *earning forecast*, dan pengungkapan CSR terhadap kinerja perusahaan dengan variabel kontrol ukuran perusahaan

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan dalam segala bidang usaha yang telah listing di BEI pada tahun 2013, metode sampling digunakan dalam penelitian adalah *purposive sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian adalah 307 perusahaan, dengan metode pengumpulan sampel adalah *cross-sectional sampling*

Hasil pengujian menunjukkan pengungkapan CSR memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan variabel-variabel independen lain tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Kata Kunci : karakteristik dewan komisaris, kinerja perusahaan, Perkara di pengadilan , pengungkapan proaktif , GCG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"...Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. "

(Q.S. al –Insyirah 5-8)

"Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

"Barangsiapa yang percaya kepada Allah SWT dan menyerahkan (semua) urusan kepada-Nya, maka akan dicukupi segala keperluannya.

(Q.S. ath-Thalaaq:2-3)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak, Ibu dan Saudari-saudariku tersayang

Sahabat dan teman – temanku

Keluarga Besar Akuntansi Undip 2011

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya maka penulisan skripsi dengan judul " **PENGARUH PERKARA DI PENGADILAN, KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS, DAN PENGUNGKAPAN SECARA PROAKTIF TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN LISTING BEI** " dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orangtua tercinta, Jasmadi dan Pujiwati yang selalu mendoakan penulis, memberikan nasihat, serta semangat dan dukungan dalam setiap langkah penulis.
2. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Dr. Suharnomo, SE, MSi (2015-2019) dan Prof. Drs. Mohammad Nasir, M.Si, Akt, PhD (2011-2015).
3. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku ketua jurusan akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt . selaku dosen pembimbing yang telah memberikan nasihat dan arahan selama proses penulisan skripsi.
5. Puji Harto, S.E, M.Si.,Akt.,Ph.D. selaku dosen wali yang telah memberikan nasihat dan arahan selama proses perwalian.

6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta seluruh staff tata usaha yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan.
7. Saudari-saudariku tersayang, Dyah Carano Fitri dan Ratu Karima.. Terima kasih untuk doa dan dukungan dari kalian.
8. Keluarga besar bani Soeparto dan bani Sukardi, terima kasih atas segala dukungan dan motivasinya selama ini.
9. *RSCS*; Anton, Khoirun, Yogi, Rino, Danu, Hadi, Topik, Ihsan, Gandar, Grafian, dan semua penghuni rusunawa Undip tembalang yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kebersamaan dan dukungannya selama ini.
10. Teman-teman kontrakan tusam; Faris, Faiq, Hendro, Deneth, Ali, Jaya, Aziz. Terima kasih untuk kebersamaan dan dukungannya selama ini.
11. *Comel's gank* : Nia, Rensi, Umi, Nindi, Rusti, Karin, Anis, Debra, Lala, Rita, Reni, Kirana, Tanti, Arin, Aris, Tsara, Bayu, Nizar. Terima kasih untuk *support*, canda tawa, keceriaan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama di Semarang.
12. Teman-teman grup aku rapopo, dolan-dolan, next trip, apalah-apalah; Huda, Fia, Arga, Pepin, Aziz, Dedi, Tika, Afina, Cici, Anisa R, Zeli, geys, Gilang, Danil, Arif, dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk *support*, canda tawa, keceriaan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama di Semarang.
13. Teman-teman seperjuangan bimbingan skripsi : Juli, Yulika, Erika, Muhajir, Afri, Brian, Sani, Aziz, dan Andrie. Terimakasih atas bantuan serta *sharing* ilmu dan pengetahuannya selama proses penulisan skripsi.
14. Teman-teman di organisasi KMA, Peduli Dhuafa dan ZIS Center Undip. Terimakasih telah mengajarkan arti berbagi sehingga penulis bisa belajar menjadi orang yang lebih bersyukur.

15. Keluarga besar Akuntansi angkatan 2011 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman selama penulis menjalani masa kuliah. Sukses untuk kita semua.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan doa, bantuan, dan dukungan dalam penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi karya yang lebih baik di masa depan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 19 Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Manfaat Penelitian	11
1.4 Sistematika Penulisan	12

BAB II	TELAAH PUSTAKA	14
2.1	Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	14
2.1.1	Teori Keagenan	15
2.1.2	Teori Pesinyalan (<i>Signaling Theory</i>)	17
2.1.3	Konsep Corporate Governance	18
2.1.3	Konsep Corporate Governance	18
2. 1.3.1	Definisi Corporate Governance	18
2. 1.3.2	Prinsip Corporate Governance	20
2. 1.3.3	Tujuan & Manfaat Corporate Governance	24
2.1.4	Konsep Perkara di Pengadilan	25
2.1.5	Konsep Karakteristik Dewan Komisaris	26
2.1.6	Konsep Pengungkapan Proaktif.....	28
2.1.7	Penelitian Terdahulu	29
2.2	Kerangka Pemikiran	34
2.3	Hipotesis	38
2.3.1	Pengaruh Perkara di Pengadilan terhadap kinerja Perusahaan	39
2.3.2	Pengaruh karakteristik Dewan Komisaris terhadap kinerja Perusahaan	40
2.3.2.1	Pengaruh Ukuran Komisaris terhadap Kinerja Perusahaan.....	41
2.3.2.2	Pengaruh Jumlah Komisaris Independen terhadap Kinerja	

Perusahaan.....	42
2.3.2.3 Pengaruh Jumlah Rapat Komisaris terhadap Kinerja Perusahaan.....	43
2.3.2.4 Pengaruh Rangkap Jabatan Komisaris terhadap Kinerja Perusahaan.....	43
2.3.2.5 Pengaruh Frekuensi Kehadiran Rapat Komisaris terhadap Kinerja Perusahaan.....	44
2.3.3 Pengaruh Pengungkapan Proaktif terhadap Kinerja Perusahaan ...	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	48
3.1.1 Variabel Dependen	48
3.1.2 Variabel Independen	48
3.1.2.1 Perkara dipengadilan	49
3.1.2.2 Karakteristik Dewan Komisaris	49
3.1.2.1 Pengungkapan Proaktif.....	52
3.1.3 Variabel Kontrol	53
3.2 Populasi dan Sampel	53
3.3 Jenis dan Sumber Data	53
3.4 Metode Pengumpulan Data	54
3.5 Metode Analisis	54
3.5.1 Analisis Statistika Deskriptif	54

3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	55
3.5.2.1 Uji Normalitas	55
3.5.2.2 Uji Heterokedastisitas	55
3.5.2.3 Uji Multikolonieritas	56
3.5.3 Analisis Regresi	57
3.6 Uji Hipotesis	58
3.6.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	58
3.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	59
3.6.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	59
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	60
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	60
4.2 Analisis Data	61
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	61
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	66
4.2.2.1 Uji Normalitas	66
4.2.2.2 Uji Heterokedastisitas	71
4.2.2.3 Uji Multikolonieritas	73
4.2.3 Analisis Regresi	74
4.2.4 Koefisien Determinasi (R^2).....	76
4.2.5 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	77
4.2.6 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	78

4.3 Interpretasi Hasil	79
4.3.1 Perkara dipengadilan Memiliki Pengaruh Negatif Terhadap Kinerja Perusahaan pada Laporan Tahunan	80
4.3.2 Ukuran Dewan Komisaris Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Kinerja Perusahaan pada Laporan Tahunan	82
4.3.3 Jumlah Komisaris Independen Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Kinerja Perusahaan pada Laporan Tahunan	83
4.3.4 Jumlah Rapat Dewan Komisaris Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Kinerja Perusahaan pada Laporan Tahunan	84
4.3.5 Rangkap Jabatan dewan Komisaris Memiliki Pengaruh Negatif Terhadap Kinerja Perusahaan pada Laporan Tahunan	85
4.3.6 Frekuensi Kehadiran Rapat dewan Komisaris Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Kinerja Perusahaan pada Laporan Tahunan	86
4.3.7 <i>Earning Forecast</i> Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Kinerja Perusahaan pada Laporan Tahunan	88
4.3.8 Pengungkapan CSR Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Kinerja Perusahaan pada Laporan Tahunan	89

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	90
5.2 Keterbatasan.....	92
5.3 Saran	94

Daftar Pustaka	95
Lampiran	97

DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 1.1 Survei ACGA	7
Table 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Table 4.1 Hasil Statistika Deskriptif	62
Table 4.2 Sample Perusahaan	63
Table 4.3 Sample Perusahaan	64
Table 4.4 Uji Normalitas Klomogorof Smirnov Sebelum Transformasi	68
Table 4.5 uji Normalitas Klomogorof Smirnof Setelah Transformasi.....	71
Table 4.6 Uji Heteroskedastisitas.....	73
Table 4.7 Uji Multikolonieritas.....	74
Table 4.8 Analisis Regresi	75
Table 4.9 Koefisien Determinasi.....	77
Table 4.10 Uji Statistik F	78
Table 4.11 Uji Statistik t	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	38
Gambar 4.1 Histogram sebelum Transformasi	67
Gambar 4. 2 Normal P-Plot sebelum Transformasi	67
Gambar 4.3 Histogram setelah Transformasi.....	69
Gambar 4.4 Normal P-Plot Setelah Transformasi.....	70
Gambar 4.5 Scatter Plot	72

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A TABULASI DATA SAMPEL PERUSAHAAN	99
LAMPIRAN B HASIL OLAH DATA SPSS	107

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab 1 pendahuluan membahas beberapa alasan yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh perkara di pengadilan, karakteristik dewan komisaris, dan pengungkapan proaktif yang merupakan komponen *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Rumusan masalah sebagai fokus utama penelitian dan tujuan serta manfaat juga dibahas dalam bab ini. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian dijelaskan secara rinci pada uraian bab 1 seperti berikut:

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja perusahaan merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan penerapan fungsi-fungsi keuangan dan manajemen dalam perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dijadikan sebagai ulat ukur dalam menilai kinerja manajerial perusahaan. Sesuai dengan Nanni, et al. (1992) dalam Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) yang mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja yang bagus secara keseluruhan menunjukkan bahwa fungsi-fungsi keuangan dan manajemen telah berjalan dengan baik sehingga sasaran tertentu perusahaan dimungkinkan dapat tercapai. Sasaran perusahaan merupakan tujuan bersama yang ingin dicapai oleh para pemangku kepentingan dalam perusahaan (*Stakeholder*), dan

untuk mencapai sasaran yang sama tersebut, diperlukan kontribusi seluruh pemangku kepentingan perusahaan.

Investor merupakan salah satu dari beberapa pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh dalam menciptakan kinerja yang baik dalam perusahaan. Peran investor dalam perusahaan adalah sebagai penyedia dana yang dibutuhkan oleh perusahaan guna mendorong semua aktivitas yang diambil dan dilakukan oleh perusahaan. Dalam melakukan kegiatan investasi, investor akan secara selektif memilih perusahaan yang akan ia danai, atau tidak sembarang perusahaan diberikan dana. Investor akan lebih menempatkan dananya pada perusahaan yang memiliki praktik *corporate governance* yang baik. Praktik *corporate governance* yang baik didefinisikan oleh IICG (*Indonesian institute of Corporate Governance*) sebagai suatu struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberi nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan moral, etika, budaya dan aturan berlaku lainnya.. Salah satu keuntungan perusahaan akan penerapan praktik *corporate governance* terkait pemerolehan dana investasi yaitu adanya kemampuan untuk meminimalkan biaya dalam pemrolehan dana investasi. Sesuai dengan penelitian Agrawal, et al. (1996) dalam Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) yang menyatakan bahwa

“A firm with good corporate governance (CG) practices can raise fund for investment at lower cost”.

Penerapan praktik *corporate governance (CG)* yang baik dalam perusahaan pada dasawarwa terakhir merupakan hal yang mulai di perhitungkan di dunia bisnis, hal ini di karenakan praktik *CG* yang baik merupakan salah satu kunci kesuksesan perusahaan dalam usaha meningkatkan keuntungan dan posisinya dalam persaingan bisnis global selain mengurangi resiko yang muncul dari segala bentuk aktivitas yang dilakukan perusahaan. Puncak perhatian dunia akan perlunya penerapan praktik *CG* yang baik adalah ketika negara-negara Asia dilanda krisis ekonomi secara global pada tahun 1997.

Kajian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank (ADB)* dalam Kaihatu, S Thomas (2006) menunjukkan beberapa faktor yang berkontribusi dalam krisis yang terjadi di Indonesia tahun 1997 antara lain adalah; Pertama, adanya konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi; kedua, kurang efektifnya fungsi pengawasan dewan komisaris dalam perusahaan, ketiga; inefisiensi dan masih rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan; keempat, terlalu tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal; dan kelima, ketidak memadainya pengawasan oleh para kreditor. Kasus yang timbul karena lemahnya *CG* adalah *market crash* yang terjadi pada tahun 1929 di Amerika Serikat yang mengharuskan dilakukannya restrukturisasi pada *CG* mereka. Kasus *Enron* ditahun 2000 memaksa perusahaan untuk memecat ribuan karyawan setelah perusahaan dinyatakan bangkrut karena kesalahan perusahaan yang dapat dikatakan karena belum menerapkan praktik *CG* dengan baik.

Di Indonesia penerapan Praktik *CG* semakin marak diperbincangkan setelah terjadinya krisis pada tahun 1998. Krisis moneter tersebut memiliki imbas pada krisis kepercayaan dan krisis keuangan dunia usaha. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas memungkinkan terjadinya manipulasi informasi oleh perusahaan. Pelanggaran tentang prinsip-prinsip *good corporate governance* dikalangan perusahaan Indonesia terjadi karena sangat minimnya peraturan yang jelas akan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dengan kinerja perusahaan sehingga kendali akan kinerja perusahaan menjadi longgar

Seluruh Organisasi di Indonesia wajib menerapkan praktik *good corporate governance*, hal ini diperkuat dengan diterbitkannya pedoman umum *good corporate governance* oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006, hl 2) yang mewajibkan setiap organisasi untuk menerapkan praktik *good corporate governance*. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik menurut Tim KNKG, (2006, hl,5) adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Uraian yang ada diatas menunjukkan bahwa penerapan GCG dalam dunia usaha diperlukan untuk menjalankan perusahaan. Beberapa penelitian memberikan hasil yang berbeda-beda mengenai hubungan antara GCG dengan kinerja perusahaan, yang berakibat munculnya keraguan akan pengaruh sebenarnya yang timbul dari penerapan GCG itu sendiri terhadap kinerja perusahaan.

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara *corpote governance* dengan kinerja perusahaan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hossain, et al. (2000) dimana semakin baik *corporate governance*

maka kinerja perusahaannya pun akan semakin baik, sedangkan penelitian-penelitian yang lain menyatakan berbeda. Hutchinson (2002) dalam Mostafa et al (2013) mengatakan bahwa hubungan antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan memiliki korelasi yang negative. Ponnu, (2008), Gupta et al, (2009) dalam Mostafa et al (2013) dalam penelitiannya mengatakan kalau tidak adanya efek sama sekali dari *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan.

Penjelasan logis yang paling mungkin untuk bisa menerangkan mengenai perbedaan yang timbul dari hasil beberapa penelitian yang sama tersebut antara lain dijelaskan dalam penelitian Mostafa et al (2013) adalah; Pertama, adanya perbedaan institusi antarnegara dimana penelitian itu dilakukan. Beberapa penelitian dilakukan di negara eropa seperti penelitiannya Hossain, et al di tahun 2000, Weir, et al di tahun 2002, Huthcinson di tahun 2002, Gupta, et al di tahun 2009, Standwick, di tahun 2010), sedangkan penelitian lainnya di lakukan di negara-negara asia seperti di negara Malaysia oleh Ponnu ditahun 2008, Haat et al di tahun 2008, Ghazali di tahun 2010 dan di Cina oleh Sami, et al di tahun 2011 serta penelitian yang dilakukan di negara-negara timur tengah seperti negara Arab oleh Kholeif di tahun 2008 dan di Iran oleh Mashayekhi dan Bazaz di tahun 2008 yang memberikan hasil berbeda untuk masing-masing kawasan wilayah yang diteliti. Kedua, pemilihan variabel yang dipakai oleh masing-masing peneliti kemungkinan juga berpengaruh terhadap perbedaan hasil dari penelitian. Seperti di ketahui, sebagian peneliti mengukur kinerja berdasarkan performa akuntansi untuk menilai *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), *asset turnover*, *earning pershare* yang dilakukan oleh Huthcinson dan

Gul pada tahun 2004, Jermias di tahun 2006, Kholeif di tahun 2008, Masayekhi dan Bazaz di tahun 2008, Sedangkan peneliti lain mengukur kinerja berdasarkan performa pasarnya seperti penggunaan *Tobin's Q* oleh Yermack di tahun 1996, Weir et al di tahun 2002, Aljifri dan Mustafa di tahun 2007, Haat et al di tahun 2008, dan Ghazali di tahun 2010.

Munculnya perbedaan hasil dari beberapa penelitian yang sejenis melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian yang sama di perusahaan-perusahaan Indonesia dengan menggunakan variabel yang beragam. Penulis memilih perusahaan di Indonesia sebagai objek dari penelitian adalah, karena masih banyaknya kasus yang muncul berkaitan lemahnya praktik GCG. Boediono (2005) dalam Rachmad (2012) mengemukakan bahwa “Indonesia di tahun 2001 terdeteksi adanya skandal keuangan di perusahaan publik oleh PT Lippo Tbk dan PT Kimia Farma Tbk. Lemahnya penerapan GCG di Indonesia dikarenakan kurang baiknya pembuatan keputusan dan tindakan dalam perusahaan”. Selain itu ranking Indonesia sendiri masih terpuruk untuk skor GCG di tahun 2012 oleh survey yang dilakukan ACGA (*Asian Corporate Governance Association*). Adapun hasil surveinya sebagai berikut:

Table 1.1

NO	Market	2007	2010	2012
1	Singapore	65	67	69
2	Hongkong	67	65	66
3	Thailand	47	55	58
4	Japan	52	57	55
5	Malaysia	49	52	55
6	Taiwan	54	55	53
7	India	56	48	51
8	Korea	45	49	45
9	China	45	49	45
10	Philippines	41	37	41
11	Indonesia	37	40	37

Keterangan: semakin rendah skor, semakin buruk GCG

Sumber: *CG Watch market scores report by AGGA, 2012*

Sedangkan untuk tahun 2014, harian Okezone.com tanggal 30 juni 2014 menyatakan bahwa skor GCG perusahaan-perusahaan di Indonesia masih menempati posisi yang rendah dibandingkan negara-negara asean lainnya, dan untuk menanggulangi masalah tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan peraturan baru yaitu *GCG Road Map*. *GCG Road Map* berlaku bagi perusahaan-perusahaan *go public* di indonesia untuk selang 2 tahun mendatang, yang bertujuan untuk mempersiapkan perusahaan Indonesia dalam menghadapi berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di tahun 2015. Melihat informasi serta pernyataan dari berbagai sumber diatas membuat penulis semakin kuat untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh komponen GCG tersebut terhadap kinerja perusahaan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian sebelumnya memberikan informasi bahwa terdapat pengaruh antara *corporate governance* (CG) dengan kinerja perusahaan seperti pernyataan Akerlof's (1970) dalam Supriy Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) dimana perusahaan dengan CG yang baik akan mengurangi informasi asimetris yang dapat mengirimkan sinyal positif kepada investor. Ketiadaan informasi asimetris akan berdampak pada kerelaan investor dalam memberikan dana pada biaya yang rendah kepada perusahaan. *Business Week* (2000) dalam Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) menyatakan bahwa perusahaan dengan ranking tertinggi dalam praktek GCG juga memiliki kinerja keuangan tertinggi dalam perusahaan tersebut. Nandelstadh dan Rosenberg (2003) dalam Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) menyatakan bahwa perusahaan dengan praktik GCG yang baik akan menghantarkan pada *stock returns* dan penilaian *tobin's Q* yang tinggi, serta menaikkan rasio arus kas ke asset yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki praktik GCG yang rendah.

La Porta et al (1997) dalam Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) mengatakan bahwa kejujuran dan transparansi hukum dan sistem peradilan memberikan kepercayaan kepada investor asing. Peraturan hukum dan kualitas penegakan hukum yang bertanggung jawab untuk perlindungan investor memiliki efek pada ukuran dan pasar modalnya.

Peng dan Jiang (2006) dalam Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) mengatakan struktur piramid yang ada pada manajemen dan karakter perilaku yang ada pada perusahaan di india, memiliki hubungan yang negative dengan kinerja dalam negara

yang memiliki sistem peraturan yang lemah.. Penelitian sebelumnya di India untuk mengukur kepatuhan hukum perusahaan dapat melalui dua indikator, yaitu melalui laporan hasil audit dari auditor eksternal dan informasi perkara di pengadilan yang dialami oleh perusahaan.

Hal lain dalam GCG yang mempengaruhi kinerja perusahaan adalah aspek dari dewan direksi dan komisaris. Fama dan Jensen (1983) dalam Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) mengatakan bahwa dewan adalah sebuah poin pengendalian yang penting dalam meredakan masalah problem *agency teory* dan membantu perusahaan untuk membentuk nilai baik kepada *Stockholders*. Penelitian sebelumnya dalam Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) menilai efektivitas dan efisensi direksi melalui 9 indikator, diantaranya adalah kepemilikan saham, dualitas CEO, ukuran direksi, jumlah direksi independen, presentasi direksi independen dalam dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, rangkap jabatan dewan komisaris, frekuensi kehadiran dalam rapat dewan komisaris, dan kompensasi berdasarkan kinerja oleh dewan komisaris..

Pendekatan proaktif yang dilakukan manajemen dengan tanggung jawab untuk penyediaan informasi *earning forecast* atau tambahan informasi dalam laporan tahunan, misal laporan GCG akan memberikan sinyal positif pada pasar. Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) mengatakan bahwa akses pada beberapa informasi tambahan dapat memfasilitasi investor atau *stockholder* dalam pengambilan keputusannya yang lebih baik. inisiatif untuk melakukan publikasi dari GCG atau laporan *corporate social responsibility* (CSR) atau laporan *enviromental, social and governance* (ESG)

dalam laporan tahunan dapat meningkatkan kepercayaan *stockholders* kepada perusahaan. di india. Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) menyatakan bahwa komite birla merekomendasikan penyertaan informasi tambahan dalam laporan tahunan seperti struktur perusahaan, perkembangannya, peluang dan ancaman, resiko dan pandangan lain kepada *stockholders*, dan sampai bulan september 2002, 41 persen perusahaan yang listing di bursa telah melaporkan hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan uraian rumusan masalah yang telah disampaikan dimuka, maka perumusan masalah yang dapat diambil dalam implementasi penelitian ini di Indonesia adalah:

1. Apakah perkara di pengadilan yang sedang dihadapi oleh perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah karakteristik dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah pengungkapan secara proaktif oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris mengenai:

1. Pengaruh perkara dipengadilan yang dihadapi perusahaan terhadap kinerja perusahaan.
2. Pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan.

3. Pengaruh pengungkapan secara proaktif oleh perusahaan terhadap kinerja perusahaan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak terutama pihak yang telah berkontribusi dan bersangkutan terhadap penelitian ini, baik manfaat secara praktis maupun teoritis, yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, terutama mengenai hal yang berhubungan tentang pengaruh praktik *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan.

2. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada investor sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam aktivitasnya di pasar modal.

3. Bagi akademisi dan pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan tambahan referensi dalam mengulas hubungan antara praktik CG dengan kinerja perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika ini dibuat untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai struktur penulisan penelitian yang terdiri atas lima bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori yang menjadi landasan dalam penulisan, konsep yang terkait dengan variabel penelitian, beberapa penelitian terdahulu yang serupa, kerangka pemikiran, dan hipotesis dari penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi variabel penelitian yang digunakan, definisi operasional dari masing-masing variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan, serta metode analisis untuk melakukan penelitian

BAB 4 HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi dari objek penelitian, pembahasan hasil analisis, dan interpretasi data hasil penelitian yang telah dilakukan

BAB 5 PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi dan berisi kesimpulan dan hasil analisis, keterbatasan penelitian, serta saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Bab telaah pustaka akan membahas secara rinci tentang teori maupun konsep yang menjadi landasan penelitian serta informasi mengenai penelitian-penelitian terdahulu. Penjelasan kerangka pemikiran menggunakan skema diberikan untuk mempermudah pemahaman dan maksud dari penelitian, serta pengembangan hipotesis dijelaskan sesuai dengan konsep pendukung pada penelitian sebelumnya.

Pada bagian pertama, dijelaskan mengenai teori apa saja yang menjadi dasar dari penelitian dan mendukung perumusan hipotesis. Adapun teori yang menjadi dasar penelitian adalah teori keagenan dan teori pesinyalan (*signaling theory*), kemudian dijelaskan pula berbagai konsep yang terkait dengan variabel penelitian.. Penelitian terdahulu menjelaskan tentang penelitian-penelitian yang memiliki tema serupa dengan dilengkapi informasi-informasi seperti; objek penelitian, variabel penelitian, hipotesis, alat analisis dan hasil dari penelitian itu sendiri. Kerangka penelitian diberikan dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam memahami hubungan antar variabel dan alur logika penelitian. Bagian terakhir dari bab ini menjelaskan pengembangan hipotesis yang ada dengan landasan teori dan konsep yang berlaku.

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Pada sub-bab ini dibahas mengenai teori yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Adapun teori yang digunakan adalah teori keagenan dan teori pesinyalan (*signaling theory*.)

2.1.1 Teori Keagenan

Menurut Sukardi dan Herdinata (2009) hal 13 menyatakan bahwa Jensen dan Meckling merupakan orang pertama yang memasukkan unsur manusia dalam model penelitian terpadu dari perilaku perusahaan. Penelitian mengenai teori keagenan tersebut pada manajemen keuangan menunjukkan sebuah hubungan keagenan atau *agency relationship* ketika satu atau lebih individu (*principal*) menguji individu lain (*agen*) untuk bertindak atas namanya dan mendelegasikan kekuasaan dalam membuat keputusan kepada karyawannya. Hubungan tersebut timbul antara pemegang saham (*principal*) dengan *agen*

Hendriksen dan Vanbreda (2000) secara sederhana menyatakan bahwa teori agensi menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi agen dan pihak yang lain bertindak sebagai principal dalam perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam jamaan (2008) ada dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dengan pemegang saham atau pihak principal dan antara manajer dengan pemberi pinjaman (*bondholders*). Selanjutnya Jansen dan Meckling (1976) dalam jamaan (2008) juga menjelaskan bahwa hubungan

keagenan merupakan sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*).

Sukardi dan Herdinata (2009) hal 14 mengatakan bahwa masalah keagenan muncul ketika manajer potensial tidak memiliki saham mayoritas dalam perusahaan. Bagi pemegang saham (*principal*) manajemen diharapkan berusaha maksimal untuk dapat memberikan kesejahteraan atau keuntungan bagi pemegang saham., Berkebalikan dengan pemegang saham, manajemen bisa saja tidak berusaha untuk mensejahterakan pemegang saham tetapi lebih memilih untuk mensejahterakan dirinya sendiri, maka disini terjadilah *conflict of interest* diantara *principal* dengan agen, terlebih lagi *asymmetric information* yang muncul sebagai akibat adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan agen akan semakin memicu adanya *conflict of interest* dalam hubungan agen dengan *principal*. Idealnya, *principal* mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen dalam mengelola perusahaan. Namun dalam kenyataannya tidak seperti demikian, ukuran keberhasilan agen yang dinikmati oleh *principal* justru tidak dapat menjelaskan hubungan antara keberhasilan yang telah dicapai, dengan usaha yang telah dilakukan agen. *asymmetric information* dalam hubungan agen dengan *principal* akan memunculkan *moral hazard* dalam diri agen.

Sukardi dan Herdinata (2009) hal 14 mengatakan bahwa *principal* dalam menanggulangi *conflict of interest* dihadapkan pada pengeluaran biaya untuk monitoring kerja manajemen serta pembentukan suatu organisasi yang dapat

meminimalkan tindakan-tindakan manajemen yang tidak diharapkan. Biaya ini sering disebut dengan *agency cost*.

Jensen dan Meckling (1976) dalam kamal dan saadi (2013) menyatakan bahwa perbedaan antara keuntungan diantara principal dengan agen disini akan memicu besarnya *agency cost*

2.1.2 Teori Pesinyalan (*Signaling Theory*)

Signaling theory merupakan teori yang menekankan pentingnya informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak luar. Informasi yang diberikan tersebut akan berpengaruh terhadap keputusan investasi yang dilakukan oleh investor atau pelaku bisnis. Informasi merupakan hal yang penting bagi investor atau pelaku bisnis. Adanya informasi akan memberikan gambaran mengenai perusahaan dimasa lalu, masa sekarang, maupun kemungkinan dimasa depan bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya akan dapat diperoleh. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi.

Menurut Jogiyanto (2000) hal 392 informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Salah satu bentuk informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang menjadi

signal bagi pihak luar perusahaan adalah laporan tahunan. Laporan tahunan perusahaan yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu mengenai suatu kejadian yang penting dalam perusahaan akan sangat dibutuhkan oleh investor atau pelaku bisnis sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam bursa, dimana isi dari laporan tahunan tersebut akan berpengaruh terhadap tindakan atau pergerakan yang dilakukan oleh pelaku bisnis atau investor dalam bursa.

2.1.3 Konsep Corporate Governance

2.1.3.1 Definisi Corporate Governance

Komite Cadbury dalam Ratnasari (2011), mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawabannya kepada *stakeholders*. Sedangkan menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* yang dikutip dari Surya dan Yustivandana, (2006) dalam Ratnasari, (2011) *corporate governance* didefinisikan sebagai berikut:

“Corporate Governance is the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specific the distribution of the right an responsibilities among different participants in the corporation such as board, manager, shareholders, and other stakeholders, and spells put the rules andf procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provide the structure through wich the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.”

Sehingga dari uraian-uraian yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.

Kemudian menurut Emirzon (2012) ada beberapa aspek penting dari GCG yang perlu di pahami beberapa kalangan bisnis, antara lain :

- a. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antara Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), dewan Komisaris, dan direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yan berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional dari ketiga organ tersebut.
- b. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh stakeholder, tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder*. Diantaranya, tanggung jawab pengelola perusahaan, manajeen, pengawasan, serta pertanggung jawaban kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnnya.
- c. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhan.

- d. Adanya perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*)

2.1.3.2 Prinsip-prinsip Corporate Governance

Menurut Emirzon (2012) pada intinya prinsip-prinsip dasar GCG yang disusun oleh OECD (*The Organization for Economic Corporation and Development*) terdiri dari lima aspek yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* atau disingkat dengan “TARIF”

a) *Transparency*

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. prinsip ini sangat penting bagi pemegang saham dan merupakan hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan para pemegang kepentingan (*Stakeholders*). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi dan best practices yang menjamin adanya pelaporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, kemudian mengembangkan *information technology* (IT) dan *management information systems* (MIS) untuk menjalin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya juga mengembangkan *enterprise risk management* yang memastikan

bahwa semua resiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan jabatan kosong secara terbuka.

b) Accountability

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dengan kata lain prinsip ini menegaskan bagaimana bentuk pertanggung jawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham. Pengalaman selama ini banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama yang berbentuk tertutup ketidakjelasan fungsi dalam pengelolaan perusahaan, misalnya siapa yang diawasi dan siapa yang mengawasi. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk penyiapan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang cepat dan tepat, mengembangkan komite audit dan manajemen Resiko dalam rangka mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan peran dan fungsi internal audit, penegakan hukum dan penggunaan *external auditor*.

c) Responsibility

Pertanggung jawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat atau *stakeholder* dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung etika bisnis, serta menjaga lingkungan bisnis yang sehat. Oleh karena itu setiap perusahaan harus menyadari bahwa beroperasinya perusahaan tidak

dapat dengan sendiri tanpa adanya dukungan dan kerjasama aktif dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

d) *Independency*

Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan diman perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip menekankan bahwa pengelolaan harus secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak aka nada tekanan atau pengaruh dari pihak manapun dan dapat menghasilkan keputusan yang obyektif. Selama ini dalam praktek di Indonesia prinsip ini kurang didukung oleh regulasi yang ada, sehingga pengaruh pemegang saham terhadap pengelola atau agen perusahaan sangat besar, terkadang direksi tidak memiliki kekuatan untuk melawan pengaruh internal dan eksternal dalam membuat keputusan. Untuk itu dalam meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan seharusnya mengembangkan aturan atau pedoman yang jelas dan tegas tentang bagaiman eksistensi organ-organ perusahaan terutama dewan komisaris, direksi, dan pemegang saham dalam menjalankan roda perusahaan.

e) *Fairness*

Fairness atau kesetaran dan kewajaran yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua

pihak yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan membuat peraturan perusahaan yang melindungi kepentingan minoritas, pedoman perilaku perusahaan dan kebijakan-kebijakan yang melindungi perusahaan dari perbuatan buruk orang dalam, *self-dealing*, dan konflik kepentingan, kemudian menetapkan bagaimana peran dan tanggung jawab organ perusahaan mulai dari dewan komisaris, direksi dan komite dan sebagainya.

Prinsip-prinsip di atas, dalam praktek secara global telah diterima oleh sebagian besar negara di dunia, bahkan dijadikan ajuan atau pedoman. Kemudian prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan kedalam enam aspek yang dijabarkan oleh OECD sebagai pedoman pengembangan kerangka kerja legal, instutisional dan regulatory untuk *corporate governance* di suatu negara. Keenam aspek tersebut adalah:

1. Memastikan adanya basis yang efektif untuk merangka kerja *corporate governance*. kerangka kerja *corporate governance* mendukung terciptanya pasar yang transparan dan efisien sejala dengan ketentuan perundangan, dan mengartikulasikan dengan jelas pembagian tanggung jawab diantara para pihak, seperti pengawas, instansi pembuat regulasi dan instansi penegakannya.
2. Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan: hak-hak pemegang saham harus dilindungi dan di fasilitasi.
3. Perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham: seluruh pemagang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemagang saham asing harus

diberlakukan setara. Seluruh pemegang saham harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian bila hak-haknya dilanggar.

4. Peran *stakeholder* dalam *corporate governance*: hak-hak para pemangku kepentingan (*stakeholder*) harus diakui sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kontrak kerjasama aktif antar perusahaan perusahaan dan para *stakeholder's* harus dikembangkan dalam upaya bersama menciptakan asset, pekerjaan, dan kelangsungan perusahaan.
5. *Disclosure* dan transparansi: *disclosure* atau pengungkapan yang tepat waktu dan akurat mengenai segala aspek material perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan *governance* perusahaan.
6. Tanggung jawab pengurus perusahaan (*Corporate Board's*): pengawasan dewan komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh direksi harus berjalan efektif, disertai adanya tuntutan startegik terhadap manajemen, serta akuntabilitas dan loyalitas direksi dan dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

2.1.3.3 Tujuan dan Manfaat Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*

Berdasarkan berbagai definisi atau pengertian GCG yang disampaikan oleh uraian diatas, dapat diketahui bahwa secara umum ada lima tujuan utama GCG menurut Emirzon (2012), yaitu:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham,
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non pemegang saham,

3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham,
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan, dan
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board Of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

2.1.4 Perkara di Pengadilan

Kejujuran dan transparansi pada hukum dan sistem perundangan akan memberikan kepercayaan pada para investor. La Porta et al (1997) menyatakan bahwa adanya peraturan hukum dan kualitas pelaksanaan dari hukum yang melindungi kepentingan investor mempunyai dampak pada ukuran pasar modal yang ada.

Menurut Peng dan Jiang (2006) dalam Mishra dan Pitabas Mohanty (2013), Struktur piramid manajemen yang merupakan salah satu ciri dari perusahaan, memiliki hubungan negative dengan kinerja perusahaan dalam suatu negara yang sistem hukum dan peradilan nya masih lemah. Seperti contoh ketika suatu negara memiliki kerangka hukum dan peradilan yang kuat akan meningkatkan fungsi monitoring dalam perusahaan sehingga dapat membantu koreksi atas masalah dalam kelola perusahaan. Salah satu indicator yang digunakan dalam menilai adanya pemenuhan dan penindakan hukum yang baik dalam iklim usaha suatu negara adalah melalui adanya pemberlakuan peraturan yang tegas dalam penyelesaian perkara dipengadilan, dimana perusahaan tanpa terkecuali memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disisi lain idealnya perusahaan dengan

kondisi sehat dan baik seharusnya terhindar dari segala masalah atas pelanggaran peraturan atau hukum yang berlaku. Terlebih masalah atau perkara tersebut telah masuk dalam ranah persidangan, dimana efek dari hal tersebut dapat berpengaruh pada laporan keuangan perusahaan, yaitu munculnya kewajiban kontinjensi atas masalah yang berlangsung atau bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan guna penyelesaian perkara perusahaan.

2.1.5 Karakteristik Dewan Komisaris

Dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab untuk mengatur aktivitas dan pengambilan keputusan strategis dalam perusahaan. Selain itu dewan komisaris juga berperan sebagai pihak penting yang dapat meringankan masalah agensi dan membantu perusahaan dalam menciptakan nilai bagi *shareholders*. Demi mendukung tercapainya efektifitas pencapaian kinerja perusahaan komposisi dari dewan komisaris yang digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini antara lain adalah; ukuran dewan komisaris, jumlah komisaris independen, jumlah rapat, rangkap jabatan, dan frekuensi kehadiran dewan komisaris dalam rapat..

a) Ukuran Dewan Komisaris

Menurut penelitian terdahulu oleh Dalton et al (1998) dalam Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara ukuran dewan komisaris dengan kinerja perusahaan. Semakin besar ukuran dewan komisaris akan meningkatkan kinerja perusahaan.

b) Jumlah Komisaris Independen

Sesuai dengan peraturan nomor Kep-00001/BEI/01-2014 yang dikeluarkan oleh BEI tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan, BEI mewajibkan perusahaan yang tercatat di bursa untuk memiliki komisaris independen dalam perusahaan. Bhagat dan Black (2002) menyatakan bahwa struktur dewan komisaris dengan mayoritas komisaris independen akan lebih efektif dalam pengawasan manajemen.

Uzun et al (2004) dalam Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki komisaris independen kecenderungan memiliki *fraud* dalam perusahaan lebih kecil daripada yang tidak memiliki komisaris independen. Menurut penelitian Byrd dan Hickman (1992) dalam Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) menunjukkan hubungan positif antara proporsi komisaris independen dengan pengukuran kinerja keuangan perusahaan.

c) Jumlah Rapat

Demi menjalankan tugasnya sebagai pengawas, dewan komisaris akan melakukan rapat bersama komisaris lainnya guna menunjang tugasnya sebagai pengawas. Menurut Davila dan Penalva (2005) dalam Mishra dan Pitabas Mohanty (2013), frekuensi rapat dewan komisaris merupakan bentuk usaha yang bagus dalam pengawasan kepada manajemen.

d) Rangkap Jabatan

Di Indonesia rangkap jabatan belum terlalu detail diatur dalam peraturan yang berlaku. Aturan mengenai rangkap jabatan hanya menunjukkan

ketidakbolehan dewan komisaris untuk memiliki benturan kepentingan atas rangkap jabatan tersebut.

Garg (2007) dalam Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) mengatakan ketika seseorang bertindak sebagai komisaris independen sekaligus anggota dewan lain dalam suatu perusahaan, maka dalam pengambilan keputusannya dapat terpengaruh atas keadaan jabatan tersebut.

e) Frekuensi Kehadiran Rapat

Frekuensi kehadiran dalam rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris menunjukkan keseriusan komisaris aktif dalam melakukan pengawasan kepada manajemen. Brown dan Caylor (2004) dalam Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) memberikan bukti bahwa, komisaris yang menghadiri rapat minimal 75% dari jumlah rapat yang ada, memberikan indikator peningkatan pada kinerja perusahaan.

2.1.6 Pengungkapan Proaktif

Pengungkapan proaktif oleh manajemen dengan tanggung jawab untuk mengungkapkan seperti penyediaan *earning forecast* atau tambahan informasi dalam laporan tahunan perusahaan seperti laporan CG (*Corporate Governance*) tata kelola akan memberikan sinyal yang baik ke pasar. Pengungkapan informasi mengenai ESG (*environmental ,social and governance*) pengelolaan sosial lingkungan maupun CSR (*corporate social responsibility*) tanggung jawab sosial juga akan memberikan sinyal positif mengenai kredibilitas dan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Publikasi

tata kelola perusahaan maupun tanggung jawab sosial serta pengelolaan lingkungan akan meningkatkan kepercayaan kepada *stakeholder*.

Adanya kepercayaan yang muncul dari stakeholder disini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan. Adapun indikator yang dipakai dalam pengungkapan proaktif dalam penelitian ini yaitu

1. *Earning Forecast*
2. **Pengungkapan CSR**

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Dalam subbab ini di jelaskan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan tema yang tidak jauh beda dengan tema yang diambil oleh penulis yaitu penelitian mengenai pengaruh CGC (*good corporate governance*) terhadap kinerja perusahaan.

Ahmed Sheikh, Luce Rebecca, dan Mayfield Clifton (2011) melakukan penelitian tentang dampak sifat internal dari tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Sample penelitian berasal dari 154 perusahaan yang tercatat dalam KSE (*karachi stock exchange*) Pakistan selama tahun 2004-2008. Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif ukuran dewan komisaris dan konsentrasi kepemilikan saham terhadap kinerja perusahaan, dimana variabel independen adalah ukuran dewan, komisaris independen, dualitas CEO, kepemilikan saham oleh dewan, dan kosentrasi kepemilikan saham sedangkan variabel dependen adalah kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Benjamin I Ehikioya (2007) mengenai hubungan struktur tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan dalam pengembangan ekonomi memberikan hasil bahwa konsentrasi kepemilikan saham dan ukuran dewan memiliki hubungan positif terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan dualitas CEO memiliki indikator untuk mengakibatkan munculnya kerugian dalam kinerja perusahaan dan kepemilikan saham yang dimiliki oleh dewan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja perusahaan. Sample dalam penelitian ini berasal dari 107 perusahaan yang tercatat dalam bursa di Nigeria tahun 1998-2002, dengan variabel dependen adalah kinerja perusahaan dan variabel independen adalah konsentrasi kepemilikan saham, saham yang dimiliki oleh dewan, ukuran dewan komisaris, dan komisaris independen.

Mashayekhi Biti dan S. Bazaz Mohammad (2008) melakukan penelitian tentang hubungan tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan di Iran, dengan menggunakan variabel dependen berupa kinerja perusahaan dan variabel independen adalah ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dualitas CEO dan direksi institusional. Penelitian ini memberikan hasil bahwa komisaris independen memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan untuk dualitas CEO dan ukuran komisaris memiliki hubungan negative dengan kinerja perusahaan, dan untuk direksi institusional tidak memiliki hubungan signifikan dengan kinerja perusahaan. Sample penelitian terdiri dari 240 perusahaan yang listing di bursa TSE Iran selama tahun 2005 dan 2006.

Penelitian yang dilakukan oleh Mostafa kamal H. dan Saadi Sawsan (2013) mengenai hubungan tata kelola perusahaan, turbulensi ekonomi, dan kinerja keuangan terhadap perusahaan yang tercatat dalam bursa UAE (Unit Emirat Arab) menggunakan sample 95 perusahaan yang tercatat dalam bursa UAE ditahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan sukarela, ukuran dewan komisaris dan dualitas CEO memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan komisaris independen, dan tipe audit tidak memiliki pengaruh signifikan pada kinerja perusahaan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian adalah kinerja perusahaan sedangkan variabel independen nya berupa pengungkapan sukarela, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dualitas CEO dan tipe audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Reny Dyah Retno dan Denies Priantinah pada tahun 2011 mengenai pengaruh *GCG* dan pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2007-2010) menggunakan variabel dependen nilai perusahaan sedangkan variabel independen adalah *GCG*. Variabel control yang digunakan adalah ukuran perusahaan, jenis industry, *leverage*, dan profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan *GCG* terhadap nilai perusahaan dari sampel yang terdiri dari seluruh perusahaan yang listing di BEI tahun 2007-2010.

Penelitian yang dilakukan oleh Ricky Arifani mengenai pengaruh *GCG* terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan variabel dependen berupa kinerja perusahaan dan variabel independen yaitu komite audit, kepemilikan manajerial,

kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris independen memeberikan hasil bahwa komite audit dan komisaris independen memeiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah 186 perusahaan yang telah listing BEI di tahun 2010-2011

Table 2.1

Peneliti dan Tahun	Metodologi	Variabel	Hasil
Nadeem Ahmad Sheikh, Zongjun Wang, dan Shoaib (2013)	Analisis <i>Ordinary least square</i> (OLS)	Variabel dependen: kinerja perusahaan Variabel independen: ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dualitas CEO, kepemilikan saham oleh dewan, konsentrasi kepemilikan saham	Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan positif ukuran dewan komisaris dan konsentrasi kepemilikan saham dengan kinerja perusahaan. a danya konsentrasi kepemilikan saham memunculkan blockholders yang dapat meningkatkan monitoring dan memaksa manajemen untuk bertindak dalam meningkatkan nilai perusahaan. sedangkan variabel yang lain tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja perusahaan
Benjamin I Ehikioya (2007)	Analisis <i>Ordinary least square</i> (OLS)	Variabel dependen: kinerja perusahaan Variabel independen: konsentrasi kepemilikan saham, sahama yang dimiliki oleh	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan saham dan ukuran dewan memiliki hubungan positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan dualitas CEO memiliki indicator untuk

		dewan, ukuran dewan komisaris, dan komisaris independen	mengakibatkan munculnya kerugian dalam kinerja perusahaan dan kepemilikan saham yang dimiliki oleh dewan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja perusahaan
Bitu Mashayekhi dan Mohammad S. Bazaz (2008)	<i>Multiple regression analysis (MRA)</i>	Variabel dependen: kinerja perusahaan Variabel Independen: ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dualitas CEO dan direksi institusional	Pada penelitian ini memberikan hasil bahwa komisaris independen memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan sedangkan untuk dualitas CEO dan ukuran komisaris memiliki hubungan negative dengan kinerja perusahaan, dan untuk direksi institusional tidak memiliki hubungan signifikan dengan kinerja perusahaan
Mostafa Kamal Hassan dan sawsan Saadi Halbouni (2013)	<i>Multiple regression analysis (MRA)</i>	Variabel dependen: kinerja perusahaan Variabel Independen: pengungkapan sukarela, ukuran dewan komisaris, dualitas CEO, tipe audit, komisaris independen	Pada penelitian ini memberikan hasil bahwa pengungkapan sukarela, ukuran dewan komisaris dan dualitas CEO memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan komisaris independen, dan tipe audit tidak memiliki pengaruh signifikan pada kinerja perusahaan
Reny Dyah Retno M. dan Denies Priantinah	<i>Multiple regression analysis (MRA)</i>	Variabel dependen: Nilai Perusahaan Variabel Independen: <i>Good Corporate</i>	Pada penelitian ini memberikan hasil bahwa praktik <i>GCG</i> berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan

		<i>Governance</i> Variabel Kontrol: Ukuran perusahaan, jenis industri, <i>leverage</i> , tingkat profitabilitas	
Rizky Arifani	<i>Regresi linear</i>	Variabel dependen: Kinerja perusahaan Variabel Independen: Komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris	Pada penelitian ini memberikan hasil bahwa komite audit dan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap kinerja yang dicapai oleh perusahaan

Pada penelitian-penelitian terdahulu diatas muncul perbedaan dalam hasil penelitan dimana munculnya perbedaan hasil pada penelitian yang serupa tersebut menurut Kamal Hassan M. dan Saadi Halbouni S. (2013) dipengaruhi oleh perbedaan institusi antar negara dan perbedaan prinsip tata kelola perusahaan antar perusahaan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat dengan tujuan untuk mempermudah dalam pemahaman penelitian. Kerangka pemikiran dalam penelitian dapat membantu menumbuhkann pemahan tentang alur logika yang digunakan dalam proses penelitian, selain itu dengan munculnya gambar-gambar dalam kerangka penelitian

dapat memberikan sedikit penjelasan mengenai alur dan ekspektasi dari variabel independen ke variabel dependen.

Perkara dipengadilan yang dialami oleh perusahaan merupakan sebuah masalah yang harus diselesaikan oleh perusahaan. Akibat adanya perkara dipengadilan akan memunculkan ketidakpastian dimasa mendatang, dan hal tersebut secara otomatis akan memunculkan kewajiban kontinjensi atas ketidakpastian yang timbul. Idealnya, perusahaan yang sehat dan dalam pengelolaan yang baik tidak akan terseret dalam masalah-masalah atau perkara di pengadilan atas pelanggaran sebuah hukum atau peraturan yang berlaku seperti masalah tunggakan pajak, gugatan hukum dan lain sebagainya. Secara langsung maupun tidak langsung, perkara di pengadilan akan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Perusahaan sebisa mungkin akan menghindari masalah atau perkara tersebut agar tidak menghambat kinerjanya. Perusahaan akan baik ketika perusahaan tidak memiliki masalah atau perkara di pengadilan tentang pelanggaran hukum maupun peraturan yang berlaku.

Dewan komisaris merupakan pihak penting yang memiliki tugas untuk menekan kemungkinan tindakan-tindakan manajemen yang dapat merugikan principal. Fungsi dewan komisaris adalah melakukan pengawasan kepada aktivitas manajemen. Semakin besar ukuran dewan komisaris maka lingkup pengawan yang dimiliki oleh dewan komisaris pun semakin luas sehingga celah untuk melakukan kecurangan oleh manajemen akan semakin sempit. Tidak adanya tindakan yang merugikan oleh manajemen akan membuat kinerja perusahaan semakin meningkat. \

Semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin besar pula lingkup pengawasan yang dapat dijangkau, dan dengan adanya pengawasan yang luas tersebut, celah kecurangan dapat di persempit dan kinerja perusahaan dapat di ditingkatkan.

Komisaris independen merupakan komisaris perusahaan yang sangat kecil kemungkinannya untuk memiliki benturan kepentingan dalam pengawasan maupun pengambilan keputusan perusahaan. Minimnya benturan kepentingan yang ada pada komisaris independen akan meingkatkan efektivitas dalam pengawasan pada manajemen, sehingga fungsi *monitoring* oleh dewan komisaris akan berjalan dengan baik, kecurangan dapat di tekan dan kinerja perusahaan pun akan meningkat. Semakin banyak komisaris independen maka semakin baik pula fungsi pengawasan sehingga kinerja perusahaan dapat dicapai. Peraturan nomor Kep-00001/BEI/01-2014 yang dikeluarkan oleh BEI tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan, menunjukkan bahwa adanya kewajiban kepada perusahaan untuk memiliki komisaris independen minimal 30% dari jajaran dewan komisaris yang ada

Dewan komisaris sebagai pihak pengawas membutuhkan pertemuan atau rapat dengan komisaris lainnya untuk membahas segala hal yang berhubungan dengan peningkatan fungsi pengawasan. Adanya rapat dewan komisaris dapat meningkatkan kualitas dari *monitoring* sehingga peningkatan kinerja dapat tercapai.

Rangkap jabatan yang dimiliki oleh dewan komisaris berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dalam aktivitasnya bekerja sebagai komisaris di perusahaan.. Benturan kepentingan berpotensi menghambat atau mempengaruhi tugas komisaris sebagai pihak pengawas perusahaan sehingga perusahaan harus menanggung kerugian akibat dari hasil kerjanya yang kurang maksimal. Semakin banyak posisi rangkap jabatan yang dimiliki oleh dewan komisaris akan mengurangi kualitas dari fungsi pengawasan sehingga kinerja perusahaan dapat menurun.

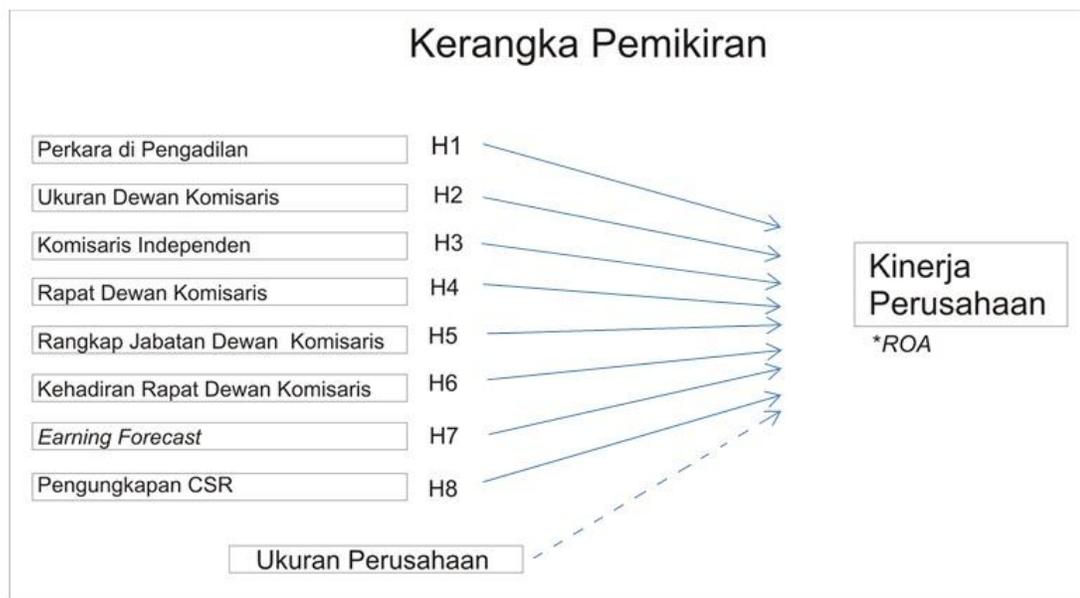
Frekuensi kehadiran komisaris dalam rapat antar dewan komisaris menunjukkan tingkat keaktifan dan keseriusan komisaris dalam melakukan pengawasan kepada manajemen. Adanya keaktifan dan keseriusan dalam rapat akan meningkatkan fungsi pengawasan dari dewan komisaris. Semakin besar frekuensi kehadiran rapat dewan komisaris maka fungsi pengawasan akan semakin baik, dan kecurangan dapat ditekan sehingga kinerja perusahaanpun dapat meningkat.

Pengungkapan informasi tambahan seperti informasi tentang *earning forecast*, CG (*corporate governance*), ESG (*environmental, social governance*), maupun CSR (*corporate social responsibility*) dapat memberikan sinyal positif pada pasar atau bursa. Pengungkapan informasi tersebut dapat menunjukkan kredibilitas dan tata kelola perusahaan yang baik pada *stakeholder* sehingga rasa percaya *stakeholder* pada perusahaan akan meningkat. Peningkatan rasa percaya pada perusahaan akan mendorong *stakeholder* untuk selalu mendukung segala aktivitas yang diambil dan dikerjakan oleh perusahaan, baik segala dukungan dalam bentuk materiil maupun

immaterial. Adanya dukungan-dukungan tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Dari uraian diatas maka kerangka pemikirannya dapat dibuat seperti berikut:

Gambar 2.1



2.3 Hipotesis

Pada sub bab ini berisi mengenai pengembangan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dikembangkan sesuai dengan landasan teori yang telah di jelaskan pada subbab sebelumnya dan mempertimbangkan penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa. Adapun penjelasan secara detail dari hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh Perkara di Pengadilan terhadap Kinerja Perusahaan

Kejujuran dan transparansi pada hukum dan sistem perundangan akan memberikan kepercayaan pada para investor. Menurut La Porta et al (1997) dalam Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) menyatakan bahwa adanya peraturan hukum dan kualitas pelaksanaan dari hukum yang melindungi kepentingan investor mempunyai dampak pada ukuran pasar modal yang ada.

Peng dan Jiang (2006) dalam Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) mengatakan bahwa struktur piramid manajemen yang merupakan salah satu ciri dari perusahaan, memiliki hubungan negative dengan kinerja perusahaan dalam suatu negara yang sistem hukum dan peradilan nya masih lemah. Seperti contoh ketika suatu negara memiliki kerangka hukum dan peradilan yang kuat akan meningkatkan fungsi monitoring dalam perusahaan sehingga dapat membantu koreksi atas masalah dalam kelola perusahaan dan berlaku sebaliknya.

Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai adanya pemenuhan dan penindakan hukum yang baik dalam iklim usaha suatu negara adalah melalui adanya pemberlakuan peraturan yang tegas dalam penyelesaian perkara dipengadilan. Idealnya, perusahaan dalam kondisi sehat dan baik akan terhindar dari segala masalah atas pelanggaran peraturan atau hukum yang berlaku. Terlebih masalah atau perkara tersebut telah masuk dalam ranah persidangan. Efek dari masalah atau perkara di pengadilan biasanya akan berpengaruh pada laporan keuangan perusahaan, yaitu munculnya kewajiban kontinjensi atas masalah yang berlangsung. Selain itu, kemungkinan biaya yang harus dikeluarkan dalam menangani masalah

atau perkara di pengadilan akan mempengaruhi laporan laba rugi perusahaan yang berimbas pada pencapaian kinerja perusahaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Perkara di pengadilan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan pada laporan tahunan

2.3.2 Pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan

Dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab untuk mengatur aktivitas dan pengambilan keputusan strategis dalam perusahaan. Dewan komisaris juga berperan sebagai pihak penting yang dapat meringankan masalah agensi dan membantu perusahaan dalam menciptakan nilai bagi *shareholders* (Fama dan Jensen, 1983) dalam Mishra dan Pitabas Mohanty (2013)

Baysinger dan Butler (1985) dalam alix Valenti (2011) mengatakan bahwa fungsi dari dewan komisaris selain memberikan pengawasan (*monitoring*) terhadap kerja dari manajemen juga dapat memberikan berbagai saran atas keputusan yang akan diambil oleh manajemen. Penelitian lain yang dilakukan oleh Wen et al (2002) memberikan bukti bahwa semakin luas dewan komisaris dengan kemampuan pengawasan (*monitoring*) yang baik akan meningkatkan level *leverage* sehingga menigkat juga nilai dari perusahaannya.

Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) mengatakan bahwa untuk mendukung tercapainya efektifitas pencapaian kinerja perusahaan dipengaruhi oleh berbagai aspek dari dewan komisaris seperti berikut; pemilikan saham, ukuran dewan komisaris, jumlah komisaris independen, prosentase komisaris independen, jumlah rapat, rangkap jabatan, frekuensi kehadiran rapat, dan kompensasi berdasarkan kinerja. Berdasarkan penjelasan diatas, pengembangan hipotesis dapat di uraikan seperti berikut:

2.3.2.1 Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan

Menurut penelitian terdahulu oleh Dalton et al (1998) dalam Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara ukuran dewan komisaris dengan kinerja perusahaan. Semakin besar ukuran dewan komisaris akan meningkatkan luas pengawasan (*monitoring*) yang dilakukan oleh komisaris terhadap manajemen, sehingga kemungkinan kecurangan yang dapat dilakukan oleh manajemen dapat dicegah atau diminimalisir dan kinerja perusahaan dapat meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan pada laporan tahunan

2.3.2.2 Pengaruh jumlah komisaris independen terhadap kinerja perusahaan

Sesuai dengan peraturan nomor Kep-00001/BEI/01-2014 yang dikeluarkan oleh BEI tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan, BEI mewajibkan perusahaan yang tercatat di bursa untuk memiliki komisaris independen dalam perusahaan. Bhagat dan Black (2002) menyatakan bahwa struktur dewan komisaris dengan mayoritas komisaris independen akan lebih efektif dalam pengawasan manajemen.

Uzun et al (2004) dalam Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki komisaris independen kecenderungan memiliki *fraud* dalam perusahaan lebih kecil daripada yang tidak memiliki komisaris independen. Menurut penelitian Byrd dan Hickman (1992) dalam Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) menunjukkan hubungan positif antara proporsi komisaris independen dengan pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Adanya komisaris independen akan meningkatkan kualitas dari pengawasan (*monitoring*) terhadap aktivitas manajemen, sehingga kemungkinan kecurangan yang dilakukan manajemen dapat diminimalisir dan kinerja perusahaan dapat meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Jumlah komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan pada laporan tahunan.

2.3.2.3 Pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan

Demi menjalankan tugasnya sebagai pengawas, dewan komisaris akan melakukan rapat bersama komisaris lainnya guna menunjang tugasnya sebagai pengawas. Menurut Davila dan Penalva (2005) dalam Mishra dan Pitabas Mohanty (2013), jumlah rapat dewan komisaris merupakan bentuk usaha yang bagus dalam pengawasan kepada manajemen.

Adanya rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris akan meningkatkan pengawasan (*monitoring*) sehingga kemungkinan kecurangan yang dilakukan manajemen dapat diminimalisir dan kinerja perusahaan dapat ditingkatkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keenam dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan pada laporan tahunan.

2.3.2.4 Pengaruh rangkap jabatan dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan

Di Indonesia rangkap jabatan belum terlalu detail diatur dalam peraturan yang berlaku. Aturan mengenai rangkap jabatan hanya menunjukkan ketidakbolehan dewan komisaris untuk memiliki benturan kepentingan atas rangkap jabatan tersebut. Garg (2007) dalam Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) mengatkan bahwa seseorang yang bertindak sebagai komisaris perusahaan sekaligus anggota dewan lain pada suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya akan rentan terpengaruh oleh kepentingan lain atas rangkap jabatan tersebut.

Rangkap jabatan dalam dewan komisaris akan berpengaruh terhadap kerja komisaris dalam melakukan pengawasan. Adanya rangkap jabatan beresiko besar munculnya benturan kepentingan dalam diri komisaris disaat bertugas sehingga pengawasan (*monitoring*) pun tidak bisa maksimal dan kinerja perusahaan menjadi turun. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketujuh dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H5: Rangkap jabatan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan pada laporan tahunan.

2.3.2.5 Pengaruh frekuensi kehadiran rapat dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan

Frekuensi kehadiran dalam rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris menunjukkan keseriusan komisaris aktif dalam melakukan pengawasan kepada manajemen. Brown dan Caylor (2004) dalam Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) memberikan bukti bahwa, komisaris yang menghadiri rapat minimal 75% dari jumlah rapat yang ada, memberikan indikator peningkatan pada kinerja perusahaan.

Peningkatan rekuensi rapat yang dihadiri oleh dewan komisaris akan menunjang kerja komisaris dalam melakukan pengawasan (*monitoring*) kepada manajemen, sehingga kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dapat diminimalisir dan kinerja perusahaanpun dapat meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedelapan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H6: Frekuensi kehadiran rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan pada laporan tahunan.

2.3.3 Pengaruh Pengungkapan Proaktif terhadap Kinerja Perusahaan

Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) menyatakan bahwa pengungkapan proaktif oleh manajemen dengan tanggung jawab untuk mengungkapkan informasi tambahan dalam perusahaan dapat memberikan sinyal baik ke bursa.

2.3.3.1 Pengaruh pengungkapan informasi *Earning Forecast* terhadap kinerja perusahaan

Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) menyatakan bahwa penyediaan informasi mengenai *earning forecast* atau tambahan informasi lain dalam laporan tahunan perusahaan seperti laporan CG (*Corporate Governance*) akan memberikan sinyal yang baik ke pasar. Publikasi tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial serta pengelolaan lingkungan akan meningkatkan kepercayaan kepada *stakeholder* sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan .

Menurut Mishra dan Pitabas Mohanty (2013), Adanya kepercayaan yang muncul oleh *stakeholder* disini diharapkan dapat meningkatkan dukungannya terhadap segala keputusan yang diambil oleh perusahaan, baik dukungan dalam bentuk materiil maupun immateriil sehingga peningkatan kinerja perusahaan dapat tercapai. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian dapat diuraikan menjadi seperti berikut:

H7: Pengungkapan informasi *earning forecast* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan pada laporan tahunan

2.3.3.2 Pengaruh Pengungkapan Informasi CSR terhadap Kinerja Perusahaan

Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) menyatakan bahwa pengungkapan informasi CSR (*corporate social responsibility*) atau tanggung jawab sosial akan memberikan sinyal positif mengenai kredibilitas dan praktik *corporate governance* perusahaan yang baik. Publikasi tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial serta pengelolaan lingkungan akan meningkatkan kepercayaan kepada *stakeholder* sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan .

Menurut Mishra dan Pitabas Mohanty (2013), Adanya kepercayaan yang muncul oleh *stakeholder* diharapkan dapat meningkatkan dukungannya terhadap segala keputusan yang diambil oleh perusahaan, baik dukungan dalam bentuk materiil maupun immateriil sehingga peningkatan kinerja perusahaan dapat tercapai.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian dapat diuraikan menjadi seperti berikut:

H8: Pengungkapan informasi CSR berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan pada laporan tahunan

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian berisi mengenai penjelasan secara teknis bagaimana penelitian akan dilakukan. Pada bab metode penelitian terdiri dari beberapa bagian antara lain variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

Pada bagian pertama bab akan dijelaskan definisi variabel-variabel penelitian beserta cara pengukuran variabel tersebut. Populasi dan sampel berisi uraian mengenai anggota populasi, kriteria dan jumlah sampel yang akan diambil, serta metode pengambilan sampel untuk penelitian. Jenis data dan sumber berisi mengenai penjelasan variabel dalam penelitian beserta sumber data atas variabel penelitian yang tersedia. Jenis data variabel dapat terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Bagian metode pengumpulan data menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam pengambilan data penelitian. Metode pengambilan data dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, di bagian akhir bab ini dibahas mengenai teknik analisis dan mekanisme penggunaannya, termasuk di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan deskripsi, alasan penggunaan alat analisis, serta pengujian asumsi dari teknik analisis tersebut.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian adalah kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan diukur berdasarkan pada tingkat ROA (*return on asset*) yang diperoleh dari pembagian laba perusahaan sebelum beban pajak terhadap total asset yang dimiliki perusahaan di akhir periode pencatatan laporan tahunan. ROA digunakan sebagai alat ukur kinerja perusahaan karena melalui ROA akan diketahui seberapa baik kinerja perusahaan dalam penggunaan asset yang ada untuk mencapai keuntungan tertentu dalam perusahaan. Banyak penelitian terdahulu yang menggunakan ROA sebagai alat pengukuran kinerja perusahaan. Adapun penelitian terdahulu tersebut antara lain adalah penelitian dari I. Ehikioya Benjamin (2013), Alex, Luce, dan Clifton (2011), Ahmed, Wang, dan Khan (2011)

3.1.2 Variabel Independen

Beberapa variabel Independen dalam penelitian antara lain adalah perkara di pengadilan, karakteristik dewan komisaris dan pengungkapan proaktif oleh perusahaan, adapun penjelasan dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut:

3.1.2.1 Perkara di Pengadilan

Tindakan operasional yang dilakukan oleh manajemen dalam aktivitas perusahaan tidak sedikit harus berurusan dengan pihak pengadilan dalam proses penyelesaian perkara atau masalah hukum yang sedang dialami oleh perusahaan. Masalah hukum adalah masalah yang timbul karena pelanggaran hukum, peraturan, atau nilai dari lingkungan perusahaan setempat, seperti contoh: masalah tunggakan pajak, masalah dengan klien tentang suatu kontrak, masalah dengan lingkungan pemerintah atau masyarakat setempat dan lain sebagainya. Cara pengukuran variabel perkara di pengadilan adalah dengan menggunakan variabel dummy dimana skor 1 diberikan apabila perusahaan sedang terlibat perkara atau masalah di pengadilan, dan skor 0 untuk kebalikannya.

3.1.2.2 Karakteristik Dewan Komisaris

Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) menyatakan bahwa dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab untuk mengatur aktivitas dan pengambilan keputusan strategis dalam perusahaan. Selain itu dewan komisaris juga berperan sebagai pihak penting yang dapat meringankan masalah agensi dan membantu perusahaan dalam menciptakan nilai bagi *shareholders*.

Semakin efektif peran dewan komisaris dalam perusahaan akan dapat meningkatkan kegiatan pengawasan (*monitoring*) terhadap aktivitas manajemen. Sehingga kemungkinan kecurangan yang dilakukan manajemen dapat berkurang dan kinerja perusahaan dapat meningkat.

Adapun cara untuk mengukur masing-masing karakteristik dewan komisaris adalah sebagai berikut:

a) Ukuran Dewan Komisaris

Menurut penelitian terdahulu oleh Dalton et al (1998) menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara ukuran dewan komisaris dengan kinerja perusahaan. Cara mengukur ukuran dewan komisaris disini adalah berdasarkan total anggota komisaris yang terdapat dalam laporan tahunan suatu perusahaan.

b) Jumlah Komisaris Independen

Sesuai dengan peraturan nomor Kep-00001/BEI/01-2014 yang dikeluarkan oleh BEI tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan. BEI mewajibkan perusahaan yang tercatat di bursa untuk memiliki komisaris Independen dalam perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bhagat dan Black (2002) menyatakan bahwa struktur dewan komisaris dengan mayoritas komisaris independen akan lebih efektif dalam pengawasan manajemen. Uzun et al (2004) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki komisaris independen kecenderungan memiliki *fraud* dalam perusahaan lebih kecil daripada yang tidak memiliki komisaris independen.

Cara mengukur jumlah komisaris independen disini adalah berdasarkan total komisaris independen yang terdapat dalam suatu perusahaan pada tahun n dan terlihat dalam laporan tahunan perusahaan.

c) Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Demi menjalankan fungsinya sebagai pengawas, dewan komisaris akan melakukan rapat bersama komisaris lainnya guna menunjang tugasnya sebagai pengawas. Menurut Davila dan Penalva (2005), jumlah rapat dewan komisaris merupakan bentuk usaha yang bagus dalam pengawasan kepada manajemen.

Cara untuk mengukur jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris adalah dengan menjumlah seluruh pertemuan rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris selama satu tahun pada tahun n , dimana informasi tersebut ada dalam laporan tahunan.

d) Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Di Indonesia rangkap jabatan belum terlalu detail diatur dalam peraturan yang berlaku. Aturan mengenai rangkap jabatan hanya menunjukkan adanya larangan bagi dewan komisaris untuk berada dalam kondisi memiliki benturan kepentingan atas rangkap jabatan tersebut. Garg (2007) mengatakan bahwa ketika seseorang bertindak sebagai komisaris independen sekaligus anggota dewan lain dalam suatu perusahaan, maka dalam pengambilan keputusannya dapat terpengaruh atas keadaan jabatan tersebut.

Cara pengukuran rangkap jabatan disini adalah dengan mengidentifikasi profil atau biografi dari seluruh anggota dewan komisaris terlebih dahulu, kemudian menggunakan pengukuran dummy. Nilai 1 diberikan apabila dalam perusahaan

minimal ada 1 komisaris yang melakukan rangkap jabatan. Nilai 0 apabila seluruh dewan komisaris terbebas dari rangkap jabatan.

e) Frekuensi Kehadiran Rapat

Frekuensi kehadiran dalam rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris menunjukkan keseriusan komisaris aktif dalam melakukan pengawasan kepada manajemen. Brown dan Caylor (2004) dalam Mishra dan Pitabas Mohanty (2013) memberikan bukti bahwa, komisaris yang menghadiri rapat minimal 75% dari jumlah rapat yang ada, memberikan indikator peningkatan pada kinerja perusahaan.

Cara mengukur frekuensi rapat disini adalah dengan cara membagi proporsi kehadiran rapat oleh seluruh anggota dewan komisaris terhadap jumlah rapat yang telah diadakan oleh dewan komisaris selama satu tahun. Informasi mengenai rapat komisaris tersebut dapat diperoleh dalam laporan tahunan perusahaan.

3.1.2.3 Pengungkapan secara Proaktif

a) *Earning Forecast*

Pengukuran *earning forecast* disini menggunakan variabel dummy, nilai 1 diberikan apabila perusahaan memberikan informasi mengenai *earning forecast* dalam laporan tahunan, dan nilai 0 diberikan apabila tidak ditemukan informasi mengenai *earning forecast* dalam laporan tahunan perusahaan.

b) Pengungkapan CSR

Pengukuran pengungkapan CSR disini menggunakan pengukuran yang dipakai oleh Lungu et all (2011) pada penelitian pelaporan CSR, dimana nilai dari

pengungkapan CSR didasarkan pada jumlah halaman dalam melaporkan segala informasi mengenai CSR yang dilakukan oleh perusahaan.

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol yang terdapat dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (SIZE). Pengukuran ukuran perusahaan dinilai menggunakan nilai logaritma dari nilai buku atas total asset dalam perusahaan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah seluruh perusahaan publik yang tercatat dalam anggota Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir tahun 2013 tanpa terkecuali.. Metode dalam pengambilan sample disini adalah *purpossif sampling*, sample perusahaan yang diambil dalam penelitian adalah hanya untuk perusahaan yang memiliki semua informasi yang dibutuhkan dalam penelitian seperti informasi tentang perkara di pengadilan, jumlah dewan komisaris, jumlah komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rangkap jabatan dalam dewan komisaris, frekuensi kehadiran dewan komisaris dalam rapat, informasi mengenai CSR (*corporate social responsibility*), dan yang terakhir adalah informasi mengenai *earning forecast*.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang telah disediakan oleh BEI (Bursa Efek Indonesia), maupun data perusahaan itu

sendiri. Data yang digunakan berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Data sekunder diperoleh melalui beberapa sumber, yaitu :

1. Situs website perusahaan,
2. <http://www.idx.co.id>, dan

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data penelitian adalah data sekunder yang diperoleh melalui website perusahaan maupun website Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumenter. Data perusahaan yang digunakan penelitian adalah data yang berdasarkan data empiris yang dimiliki dan dipublikasi oleh perusahaan. Data yang dimaksud dalam hal ini adalah laporan tahunan dan laporan keuangan. Data dalam penelitian juga dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka. Landasan teori diperoleh dengan mengkaji berbagai literatur pustaka yang relevan, seperti buku, jurnal, serta sumber yang lain.

3.5 Metode Analisis

Hipotesis dalam penelitian ini dengan metode analisis regresi. Sebelum analisis regresi diterapkan, dilakukan terlebih dahulu analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran secara umum tentang variabel yang ada, seperti data *mean*, *median*, *standart deviation*, dan lain-lain. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum data dianalisis dengan menggunakan metode regresi.

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan metode dalam statistik yang berguna untuk menggambarkan karakteristik data secara umum dalam penelitian. Penggambaran data ini bertujuan agar data yang digunakan dapat dengan mudah untuk dipahami. Analisis deskriptif yang dilakukan atas data penelitian ini diantaranya adalah rata-rata dan standar deviasi. (Ghozali, 2009)

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan sebagai syarat agar model yang digunakan dalam penelitian dapat dioperasikan.. Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi *cross-sectional*, sehingga uji asumsi klasik yang perlu dilakukan adalah uji uji normalitas, uji heterokedstisitas, dan uji multikolonieritas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menguji apakah residual dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Cara yang digunakan untuk mengetahui normalitas residual dalam model regresi adalah dengan melihat grafik histogram, uji statistic non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). dan *normal probability plot*,

Suatu model dikatakan memiliki distribusi normal jika pola grafik histogram tidak menceng ke kanan ataupun kiri. Data yang memiliki distribusi normal menunjukkan, grafik probabilitas yang normal dan dapat terlihat dari titik-titik yang penyebarannya mendekati garis diagonal. Pada uji statistic non-parametrik

Kolmogorov-Smirnov (K-S) data residual yang terdistribusi normal akan menghasilkan tingkat signifikansi di atas 5 persen (Ghozali, 2009)

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah model yang homokedastisitas, artinya variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dalam model regresi adalah dengan melihat grafik *scatterplot* selain itu, uji park juga digunakan untuk mendukung hasil yang menunjukkan ada tidaknya heterokedastisitas berdasarkan dari hasil pola grafik *scatterplot* (Ghozali, 2009).

3.5.2.3 Uji Multikolonieritas

Suatu model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi satu sama lain diantara variabel independennya. Uji multikolonieritas merupakan alat yang digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Multikolonieritas dalam model regresi dapat dilihat dari :

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan estimasi model empiris sangat tinggi, tetapi secara individual, variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel independen. apabila korelasi yang muncul cukup tinggi (diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas dalam model regresi. Ukuran nilai tolerance dan *Variance*

Inflation Factor (VIF) dapat juga digunakan untuk menemukan ada tidaknya multikolonieritas. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelindenden lainnnya.askan oleh variabel Batas nilai yang umumnya dipakai sebagai acuan dalam menunjukkan multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2009).

3.5.3. Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan sebagai metode analisis karena dapat mengukur tingkat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan memperlihatkan arah hubungan yang ada diantara dua variabel tersebut.

Analisis regresi digunakan karena variabel independen yang memepengaruhi variabel dependen berjumlah lebih dari 1, selain itu data terdiri dari berbagai perusahaan yang berbeda dalam tahun yang sama, yaitu tahun 2013.

Adapun persamaan regresinya adalah sebgai berikut:

$$\text{ROA} = \beta_0 + \beta_1\text{PER} + \beta_2\text{UDK} + \beta_3\text{JKI} + \beta_4\text{JRDK} + \beta_5\text{RJDK} + \beta_6\text{FKRDK} + \beta_7\text{EFOR} + \beta_8\text{CSR} + \beta_9\text{UPER} + \varepsilon$$

Keterangan :

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_9$ = Koefisien regresi

PER = Perkara di pengadilan

UDK = Ukuran dewan komisaris

JKI = Jumlah komisaris independen

JRDK = Jumlah rapat dewan komisaris

RJDK	= Rangkap jabatan dewan komisaris
FKRDK	= Frekuensi kehadiran rapat dewan komisaris
EFOR	= Pengungkapan <i>Earning forecast</i>
CSR	= Pengungkapan CSR
UPER	= Ukuran perusahaan
ROA	= <i>Return on asset</i> (kinerja perusahaan)
ε	= Error

3.6 Uji Hipotesis

Uji hipotesis akan dilakukan terhadap delapan hipotesis yang ada dalam penelitian, adapun langkah untuk pengujian hipotesis tersebut adalah dengan uji nilai koefisien determinasi, uji signifikansi simultan (statistik F), dan uji signifikansi parameter individual (uji statistic t).

3.6.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel depend amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien detrminasi untuk data silang (*crosssection*) cenderung relative rendah. Kecenderungan tersebut disebabkan karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan. Kelemahan mendasar penggunaan

koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel yang dimasukkan ke dalam model. Nilai koefisien determinasi akan meningkat setiap ada penambahan satu variabel independen, meskipun variabel tersebut sebenarnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).

3.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model penelitian memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Terdapat dua kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian statistic F, H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5% apabila nilai F lebih besar daripada 4 dan apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel.

3.6.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Untuk mengetahui apakah H_0 ditolak atau diterima, terdapat dua kriteria pengambilan keputusan yang dapat digunakan dalam uji statistik t. Kriteria yang pertama adalah H_0 ditolak jika nilai t lebih besar daripada 2. Kriteria kedua adalah apabila nilai statistic t hitung lebih besar dibandingkan nilai t table maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen dapat diterima. (Ghozali, 2011).